

## Rawan Pelanggaran, PBH Peradi Dampingi Kalurahan

WONOSARI (KR) - Korwil Persatuan Advokat Indonesia (Peradi) DIY M Irsyad Thamrin MH melantik pengurus Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Wonosari di ruang Handayani Pemkab Gunungkidul, Rabu (6/10). Dalam kesempatan tersebut Tommy Harahap SH MH dilantik menjadi Ketua Pengurus PBH Peradi Wonosari. "Dengan dilantikannya pengurus baru, diharapkan nantinya mampu bekerjasama dengan pemerintah daerah. Termasuk mampu melakukan pendampingan baik di jajaran pemerintah daerah, kalurahan hingga masyarakat umum di Gunungkidul," kata Korwil Peradi DIY M Irsyad Thamrin.

Kegiatan dihadiri Bupati Gunungkidul H Sunaryanta, PBH Peradi Pusat Suhendra Asido Hutabarat MH, DPC Peradi Gunungkidul Suyanto Siregar SH, Ketua Pengadilan Negeri Wonosari, Forkompinda dan undangan. Dalam kesempatan tersebut juga dilaksanakan penandatanganan kesepakatan bersama

antara Pemkab Gunungkidul dengan DPC Peradi Gunungkidul. Tommy Harahap, menambahkan, melalui kerjasama ini menjadi awal untuk melangkah.

"PBH Peradi juga akan menjalin kerja sama dengan penegak hukum lain, termasuk dinas ataupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Gunungkidul," imbuhnya.

Diungkapkan, termasuk memberikan pendampingan bagi pemerintah kalurahan. Karena menjadi instansi yang memiliki kerawanan pelanggaran. Karena selama ini begitu muncul kasus. Diperlukan upaya preventif, pendampingan bagi kalurahan agar nantinya dapat mengambil kebijakan yang tidak melanggar hukum. Karena ada juga kasus yang ternyata diambil kebijakan tidak memahami aturan.

"Termasuk akan melakukan pendampingan bagi masyarakat kurang mampu," jelasnya. (Ded)-f

## Harga Rendah, Petani Tunda Jual Beras

PENGASIH (KR) - Petani diimbau untuk menunda menjual beras karena harga di pasar rendah pada kisaran Rp 6.000 per kilogram.

"Kami berharap dengan kondisi harga beras atau gabah di tingkat petani yang rendah, sebaiknya tunda jual terlebih dahulu. Jangan sampai merugi dan tidak seimbang dengan biaya yang dikeluarkan untuk produksi," ujar Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kulonprogo Ir Muh Aris Nugroho MMA, Selasa (5/10).

Di beberapa kalurahan yang memiliki lumbung pangan, petani bisa menyimpan gabahnya, dengan harapan tunda jual dalam wujud gabah dan disimpan. Nanti kalau kondisi normal, baru dijual.

"Sekarang kondisi tidak normal. Berharap pandemi Covid-19 ini dapat segera teratasi, dan kondisi kembali normal. Gabah yang disimpan di lumbung pangan bisa dijual sesuai kebutuhan, sisanya untuk stok mencukupi kebutuhan pangan keluarga," ucap Aris.

Pihaknya, kata Aris, juga sudah berkoordinasi dengan gabungan kelompok tani yang membeli beras petani untuk bantuan pangan non tunai (BPNT) dan beras untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) agar sebanyak-banyaknya menyerap gabah

dan beras dari anggotanya. Kebutuhan beras untuk BPNT dan ASN tidak terpengaruh dengan pasar. "Kami optimalkan penyerapan gabah dan beras melalui gabungan kelompok tani, dengan harapan harga tetap tinggi. Selain itu, gabah atau beras tersebut bisa untuk cadangan di gudang gapoktan," katanya.

Kebutuhan beras untuk BPNT dan ASN setiap bulan berkisar 480 ton, belum termasuk beras ASN. Untuk penyerapan beras ke petani, Dispergakan Kulonprogo membuka kran sebanyak-banyaknya gapoktan yang siap mensuplai e-Warong penyalur BPNT. "Sehingga beras tidak ada dari luar Kulonprogo. Kami memegang teguh komitmen 'Bela Beli Kulon Progo'," tandas Aris.

Menurut Martiyem salah satu petani di Kapanewon Sentolo, ia kesulitan menjual beras dari hasil panen pada awal 2021 atau panen pada Februari. Di penggilangan padi, tidak membeli panen lama, yang dibeli hanya beras hasil panen terbaru. "Saya menjual beras ini untuk nebus pupuk subsidi sebagai persiapan masa tanam Oktober. Bila beras tidak laku, bagaimana membeli pupuk dan membayar traktor," ungkap Martiyem. (Wid)-f

## GENERASI PENERUS BANGSA

### Tanamkan Nilai Etika Berlalu Lintas

PENGASIH (KR) - Anak-anak/pelajar adalah generasi penerus bangsa. Agar menjadi generasi penerus yang baik, harus ditanamkan nilai-nilai etika, salah satunya adalah etika berlalu lintas. Untuk itulah perlu adanya kesepakatan bersama antar pemangku kebijakan untuk menyelamatkan generasi penerus bangsa dari hal-hal yang tidak diinginkan.

"Harapannya dengan penanaman nilai-nilai etika berlalu lintas ini agar terlahir generasi yang berkualitas. Generasi yang menjadi teladan dalam keselamatan berlalu lintas," ujar Kepala Kankemenag Kulonprogo, HM Wahib Jamil SAG MPd usai acara Penandatanganan Kesepakatan Bersama (MoU) "Penanaman Nilai-nilai Etika Berlalu Lintas", di Aula SMKN 2 Pengasih, Rabu (6/10).

Penandatanganan kesepakatan bersama MoU dilakukan Bupati, Kepala Kankemenag, dan Kepala Balai Pendidikan Mene-

ngah Kulonprogo. Sedangkan untuk perjanjian kerjasama antara Dinas Perhubungan dengan Kankemenag dan Balai Pendidikan Menengah.

Usai acara penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama, dilanjutkan dengan Bimtek penanaman nilai-nilai etika berlalu lintas yang diikuti perwakilan guru sekolah/madrasah pilot project.

Wahib Jamil menuturkan ada beberapa madrasah yang menjadi pilot project program ini.

"Berharap program ini bisa berkesinambungan, sehingga benar-benar tertanam nilai-nilai etika berlalu lintas di kalangan pelajar. Juga dapat membawa kemajuan bagi perkembangan madrasah. Sehingga terwujud madrasah yang hebat dan bermartabat," pungkask Jamil.

Sementara itu Bupati Kulonprogo, Drs H Suttedjo mengapresiasi adanya kesepakatan bersama dan perjanjian kersama

tersebut.

"Perjanjian kerjasama ini diharapkan agar setiap pengguna lalu lintas dapat mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada," ungkap bupati.

Bupati berpesan pula kepada orang tua agar tidak mengizinkan anaknya yang belum cukup umur serta memenuhi persyaratan regulasi dalam mengendarai kendaraan bermotor.

"Ini yang menyebabkan tingginya angka kecelakaan di jalan raya terutama di kalangan pelajar. Karena mayoritas kecelakaan lalu lintas terjadi karena faktor manusia (human error)," imbuhnya.

Kerjasama ini diharapkan bisa berkesinambungan untuk menanamkan nilai-nilai etika berlalu lintas di kalangan pelajar.

"Memang dalam hal ini perlu kerjasama dari berbagai unsur baik itu pendidikan, kepolisian, kesehatan, Kankemenag, dan lain-lain," pungkasknya. (Wid)-f

## KAPOLRES KUNJUNGI MPP

### Perpanjangan SIM Jangan Terlambat

WATES (KR) - Kapolres Kulonprogo AKBP Muharomah Fajarini SH SIK berpesan kepada masyarakat yang ingin mengajukan pelayanan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) agar jangan sampai terlambat. Masyarakat perlu mengetahui batas akhir berlakunya SIM. Kalau dulu mungkin menghafalnya tanggal lahirnya, tapi sekarang harus dicermati lagi karena tidak seperti dulu batas akhirnya.

Hal itu dikatakan Kapolres Fajarini saat melakukan kunjungan ke Mal Pelayanan Publik (MPP) di Jalan KH Ahmad Dahlan Wates, Kamis (7/10). Fajarini ingin mengetahui pelayanan SIM, SKCK dan Samsat. Dalam kunjungan itu, Fajarini bertanya langsung kepada masyarakat yang tengah melakukan perpanjangan SIM dan SKCK

"Jadi sebelum batas akhir, bisa seminggu atau sepuluh hari sebelum berakhir, agar melakukan proses perpanjangan. Jangan sampai telat, bahkan satu hari saja, karena nanti mengurusnya seperti pengajuan baru. Kasihan kalau sudah sepuh, harus melakukan tes dari awal. Padahal kalau bisa perpanjang kan lebih mudah," katanya.

Lebih lanjut Fajarini menyatakan, adanya pelayanan Polres Kulonprogo di MPP tersebut, diharapkan meringankan masyarakat untuk mengurus keperluan, baik untuk SIM maupun SKCK yang tidak harus ke Polres. iSemoga pelayanan Polres Kulonprogo untuk masyarakat bisa dimanfaatkan dengan maksimal dan kami terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat," pungkasknya. (Wid)-f

## TAHUN ANGGARAN 2021

# 642 Rumah Tak Layak Huni Terima Bantuan

WONOSARI (KR) - Program pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Gunungkidul terus berjalan dan pada tahun 2021 terdapat sebanyak 642 unit RTLH yang tersasar bantuan dari pemerintah. Adapun bantuan RTLH tersebut bersifat stimulan. Kepala Bidang Perumahan Rakyat, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPRKP) Gunungkidul, Handoko menuturkan, dalam penanganan rumah tidak layak huni, ada dua sumber pendanaan yang digunakan untuk program tersebut.

"Dari APBD Gunungkidul dengan anggaran Rp 17.500.000,- per unitnya dan ABPN sebesar Rp 20.000.000,- per unit," katanya, Kamis (7/10).

Berdasarkan laporan yang ada, untuk sumber pendanaan APBN sendiri ada 51 unit rumah tidak layak huni yang dibangun pemerintah. Rumah-rumah ini tersebar di seluruh kapanewon Kabupaten Gunungkidul. Untuk

sumber dana yang berasal dari APBN sudah 100 persen selesai pengerjaannya. Kemudian untuk program yang didanai dari APBD sebanyak 591 unit rumah, sekarang ini, program tersebut masih dalam proses pembangunan.

Diperkirakan, lantaran progresnya merata sudah mencapai 70 sampai dengan 80 persen, maka dalam waktu yang tak

lama lagi, program bisa terselesaikan. "Kami optimis pengerjaannya dapat tepat waktu," ujarnya.

Untuk Kabupaten Gunungkidul rumah tidak layak huni memang masih banyak ditemukan. Sejak beberapa tahun silam, pemerintah terus berupaya meretaskan permasalahan tersebut agar masyarakat bisa memiliki hunian yang layak dan sehat. Infrastruktur baik jalan,

rumah dan tempat layanan masih menjadi prioritas pembangunan daerah.

Beberapa waktu lalu, Wakil Bupati Gunungkidul Heri Susanto mengatakan perlu adanya kerjasama yang baik antara pemerintah kalurahan, kabupaten hingga pusat dalam penanganan permasalahan rumah tidak layak huni ini. Pihaknya berharap masing-masing memiliki program yang terarah dan terukur untuk meningkatkan derajat dan kualitas hidup warganya.

"Pendataan kami harapkan terus dilakukan dan terupdate sehingga nantinya program pemerintah lebih tepat sasaran," tutupnya. (Bmp)-f

## MEMASUKI MUSIM PANCAROBA

### DLH-BPBD Data Pohon Rawan Tumbang

WONOSARI (KR) - Menurutnya, identifikasi pepohonan di jalur umum jadi salah satu langkah antisipasi menghadapi potensi cuaca ekstrem di masa pancaroba ini yang bisa berpotensi menyebabkan terjadinya pohon tumbang. Sekretaris DLH Gunungkidul Aris Suryanto mengatakan pihaknya sudah melakukan identifikasi terhadap pohon-pohon yang berpotensi rawan tumbang. "Pendataan sudah kami lakukan hampir di semua ruas jalan umum," katanya, Kamis (7/10).

Menurutnya, identifikasi pepohonan di jalur umum jadi salah satu langkah antisipasi menghadapi potensi cuaca ekstrem. Adapun prosesnya dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kebersihan dan Pertamanan. Sedangkan untuk proses identifikasi lainnya, Aris mengatakan bergantung pada laporan masyarakat. Sebab itu pihaknya meminta warga bisa menginformasikan atau mengajukan permohonan ke DLH untuk penanganan pohon yang

rawan tumbang.

Seperti pohon-pohon yang sudah terlihat lapuk, itu kami tangani. Untuk pohon yang dinyatakan lapuk akan langsung ditangani dengan cara ditebang. "Sedangkan untuk pohon yang terlalu rimbun dan juga berpotensi tumbang, dilakukan perampangan atau pemangkasan," ujarnya.

Sementara untuk titik rawan yang berpotensi terdampak pohon tumbang tahun ini jumlahnya tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Kare-

na itu masyarakat juga diimbau untuk memangkas atau menebang pohon sebagai antisipasi mandiri. Langkah antisipasi tetap perlu dilakukan. Mengingat Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperkirakan adanya potensi cuaca ekstrem di bulan Oktober saat memasuki musim penghujan.

"Kewaspadaan tetap harus dilakukan mengantisipasi terjadinya bencana alam selama pancaroba," terangnya. (Bmp)-f

## UPAYA PELESTARIAN SATWA

### BKSDA Lepasliarkan 2 Satwa Burung Elang

KULONPROGO (KR) - Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Yogyakarta bekerjasama Wildlife Rescue Center (WRC) Yogyakarta dan PT Pertamina (Persero) melepasliarkan dua satwa burung Elang Alap Jambul dan Elang Brontok di Punthok Gondang Pedukuhan Gunungkelir Kalurahan Jatimulyo Kapanewon Girimulyo, Rabu (6/10).

Pelepasliaran Elang Alap Jambul bernama latin *Accipiter Trivirgatus* dan Elang Brontok dengan nama latin *Nisaetus Cirrhatus* tersebut sebagai upaya pelestarian satwa burung di wilayah Kabupaten Kulonprogo.

Menurut Kepala BKSDA Yogyakarta, M Wahyudi, burung Elang Brontok berasal dari Stasiun Flora dan Fauna Bunder Gunungkidul. Sedangkan, Elang Alap Jambul dari WRC Kulonprogo. Kedua satwa sudah layak dilepasliarkan ke alam be-

bas karena telah memenuhi sejumlah indikator bagi hewan untuk dilepaskan ke ekosistem hutan di Kulonprogo.

"Kedua burung sudah terlihat kembali sifat liarnya. *Assessment* akan dilakukan petugas setiap hari. Laporan dari petugas bisa mengindikasikan burung sudah siap terbang di alam bebas," katanya menambahkan kedua satwa juga telah menunjukkan perilaku mengambil mangsa yang biasa dilakukan satwa burung di alam bebas.

"Pemilihan lokasi pelepasliaran kedua satwa burung yang masuk kategori raptor itu sudah melalui survei habitat oleh petugas kami. Upaya kajian tempat juga sudah dilakukan. Vegetasi di Pudukuhan Gunungkelir, Jatimulyo, Girimulyo mendukung program konservasi," jelasnya.

Pelepasliaran satwa ke alam bebas merupakan langkah BKSDA

Yogyakarta mendukung upaya konservasi di wilayah DIY.

"Konservasi memiliki tiga konteks yakni bisa memelihara seekor satwa. Mengembalikan satwa ke alam bebas. Satwa yang dinyatakan tidak bisa bertahan hidup juga tidak bisa dibunuh. Tapi kita bisa menempatkan satwa di ruang konservasi sampai akhir hayatnya," tutur Wahyudi.

Bupati setempat Drs Suttedjo menegaskan Pemkab mendukung upaya pelestarian satwa. Pelepasliaran satwa burung di wilayah yang sudah melalui sejumlah survei dan kajian di wilayah Kalurahan Jatimulyo tentu bisa mendukung upaya konservasi satwa burung maupun lainnya agar tidak punah.

"Jatimulyo sudah beberapa kali jadi tempat melepasliarkan satwa burung hendaknya bisa dijaga agar tidak punah. Sehingga, populasi satwa berkembang," imbau Bupati Suttedjo. (Rul)-f

## SURAT EDARAN DPP

### Imbau Petani Mulai Siapkan Lahan

WONOSARI (KR) - Dinas Pertanian dan Pangan (DPP) Kabupaten Gunungkidul mengeluarkan Surat Edaran (SE) kepada petani agar mempersiapkan lahan pertanian mereka. Surat edaran tersebut disosialisasikan kepada petani lantaran berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) untuk kawasan Gunungkidul memasuki musim hujan dan masim tanam pertama pada Oktober.

Kepala Bidang Tanaman Pangan, Dinas Pertanian dan Pangan, Dharjo Yuwono berharap agar surat edaran yang dibuat DPP segera ditindaklanjuti para petani. Mulai dari persiapan lahan untuk musim tanam pertama lahan kering. "Sudah saatnya mulai melakukan pengolahan lahan pertanian dengan traktor agar lebih mudah dan efektif," katanya, kemarin.

Selain mempersiapkan lahan juga diimbau untuk penyiapan benih baik diperoleh dari bantuan pemerintah maupun membeli sendiri. Kemudian petani juga diimbau untuk segera menebus pupuk subsidi

di dari pemerintah sehingga nantinya tidak terlambat dalam pengambilan dan penggunaannya. Terutamanya pupuk jenis urea, NPK, SP 36, maupun ZA. Harapannya sebelum musim tanam pertama untuk pupuk urea sudah ditebus 50 persen oleh para petani. Pihaknya juga mengimbau kepada para petani yang menerapkan pola tanam ngawu-awu atau melakukan penebaran dan penanaman benih sebelum turun hujan agar berpedoman prakiraan iklim dari BMKG. Hal tersebut cukup penting agar petani tidak rugi akibat gagal panen dan salah perhitungan. Sebab berdasarkan pengalamannya, seringkali hujan yang terjadi pada awal terkadang hanya sementara saja.

"Nantinya kami melalui Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) juga akan terus melakukan koordinasi dan pendampingan," ucapnya.

Seperti pada umumnya, pada masa tanam pertama seluruh lahan di Gunungkidul dimanfaatkan untuk menanam tanaman pangan jenis padi. Kemudian dilanjutkan pa-

da masa tanam kedua (marengan) dan ada sebagian yang mulai beralih ke komoditas lainnya seperti kedelai, kacang dan hijau. Merujuk rilis Kepala Stasiun Klimatologi Yogyakarta berdasarkan perkiraan pada dasarian pertama Bulan Oktober, wilayah Sleman bagian utara akan memasuki musim penghujan. Kemudian pada dasarian II wilayah yang akan masuk musim penghujan adalah Kabupaten Sleman bagian utara dan barat, serta Kulon Progo bagian utara dan barat.

Untuk bulan Oktober dasarian III barulah Sleman bagian timur, Kota Yogyakarta, Gunungkidul, Bantul, dan Kulon Progo bagian tengah serta selatan. Hujan yang terjadi sifatnya normal kemudian untuk puncak musim hujan diperkirakan terjadi pada bulan Januari 2022 mendatang.

Adapun panjang musim penghujan pada periode 2021/2022 20 dasarian. Sementara untuk wilayah Sleman utara dan barat mencapai 22 dasarian, dan Kulon Progo bagian utara serta barat 21 dasarian. (Bmp)-f